



# Buletin Parlamentaria

Nomor 1179/I/XII/2021 • Desember 2021

Inter-Parliamentary Union  
For democracy. For everyone.



## Pimpin *General Debate* IPU, Puan Bicara Pemerataan Vaksin Hingga Transparansi DPR



3 Cegah Varian Baru Covid, Sufmi Dasco Nilai Perlu Pembatasan Perjalanan dari Afrika Selatan



5 Gus Muhaimin Desak Komisi X dan Kemnaker Pastikan Jaminan Sosial Eks Atlet Nasional



9 772614 339005



BULETIN

# Pimpin *General Debate* IPU, Puan Bicara Pemerataan Vaksin Hingga Transparansi DPR

tersebut semakin diperparah oleh ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.

“Tantangan ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. Maka kita harus mengambil pelajaran tentang bagaimana memperkuat ketahanan demokrasi. Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” terang Puan lebih lanjut.

Oleh karena itu, Ketua DPR RI perempuan pertama itu menegaskan demokrasi harus segera diperkuat demi selamat dari dampak krisis akibat

**M**emimpin sesi debat umum dalam *Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly* ke-143 di Madrid, Spanyol, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani membahas berbagai isu mulai dari pemerataan vaksin Covid-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi. Sebanyak 45 pimpinan parlemen dari berbagai negara sepakat isu-isu yang dibahas oleh Puan relevan untuk dibahas pada masa pandemi.

“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” tutur Puan dalam Bahasa Inggris di hadapan forum yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Spanyol, Sabtu (27/11).

Dalam tajuk *‘Contemporary challenges to democracy: Overcoming Division and Building Community’*, politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan parlemen harus berperan dalam menjaga demokrasi di tengah krisis yang dialami seluruh dunia, seperti prediksi lebih dari 800 juta orang tahun depan kekurangan gizi, belum meratanya vaksinasi Covid-19, hingga pemanasan global.

Tidak hanya itu, Puan menyebutkan, dunia juga akan mengalami krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memimpin sesi debat umum dalam IPU General Assembly ke-143. Foto: Ist/nvl

yang tentu akan berpengaruh pada politik, ekonomi dan sosial negara. Di saat yang sama, masyarakat terpapar oleh berita hoaks yang jika dibiarkan semakin memperbesar polarisasi. Kemudian, ia menilai, krisis-krisis

pandemi Covid-19 ini.

Dirinya meminta setiap negara di dunia harus segera mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan. ■ ts/sf

# Cegah Varian Baru Covid, Sufmi Dasco Nilai Perlu Pembatasan Perjalanan dari Afrika Selatan

**V**irus Corona varian baru bermunculan, salah satunya varian B.1.1.529 yang baru teridentifikasi menyebar di Afrika Selatan. Dilansir dari *The Guardian*, varian yang pertama kali terlihat di Bostwana ini teridentifikasi pada 10 kasus di tiga negara di kawasan Afrika Selatan. Sejumlah negara, termasuk Inggris, telah melakukan langkah tegas dengan menerapkan pembatasan penerbangan dan mewajibkan pelancong dari beberapa negara bagian Afrika Selatan untuk menjalani karantina.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Kesehatan RI agar segera melakukan penelitian, mencari informasi dan data yang akurat perihal adanya varian virus baru B.1.1.529. Pimpinan DPR itu juga mendesak kepada Pemerintah untuk sementara waktu segera melakukan pembatasan perjalanan terhadap Afrika Selatan dan negara-negara lain yang teridentifikasi.

"Saya pikir, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan, mitigasi dan melindungi rakyat Indonesia dari varian virus baru Covid-19," kata Dasco dalam keterangan pers kepada *Parlementaria*, Jumat (26/11). Menurut politisi Partai Gerindra



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok/nvi

itu, berdasar informasi yang ia terima, varian baru ini dapat bermutasi dua kali lipat lebih banyak dari pada jumlah mutasi pada varian Delta.

"Menghadapi varian Delta saja kita sudah kewalahan, rumah sakit penuh, para nakes kelelahan, obat-obatan susah, oksigen sulit dan berjatuhnya korban meninggal yang tidak sedikit. Oleh karenanya, pemerintah harus mengambil langkah tegas agar varian B.1.1.529 yang katanya lebih ganas daripada (varian) Delta ini masuk ke negara kita," tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu. ■ ann/sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kabag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kabag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kabag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval, Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat,

S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca

Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen,

Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat

Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih

Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

**FOTOGRAFER**

Prima Danurto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari

Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu

Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa

Amanda Indianti Siahhaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki

Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa,

Safitri Restu Widyowati, Rosnita

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kabag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kabag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Ilsandi Mulyana, Yudi Kresna, Hidayatulloh

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**

**DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN**

**HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri 'Talkshow Olahraga dari Hobi ke Profesi' di Ballroom Menara BNI. Foto: Jaka/nvl

# Gus Muhaimin Desak Komisi X dan Kemnaker Pastikan Jaminan Sosial Eks Atlet Nasional

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri *talkshow* olahraga 'Dari Hobby ke Profesi' di Menara BNI, Jakarta. Acara ini digelar atas kerja sama Akademi Milenial Indonesia (AMI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), PSSI, APPI dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sambutannya, Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, bercerita bahwa beberapa waktu lalu tepatnya pada 1 September 2021, ia sempat bertemu dengan

beberapa pesepakbola tanah air secara virtual, seperti Firman Utina, Bimasakti, Andrithani.

Mereka mewakili suara ribuan atlet pesepakbola, dari Liga 1 hingga 3, bahkan yang amatir. Hadir juga saat itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah. Pertemuan tersebut membahas soal upah dan penghasilan, akses jaminan sosial, tiadanya sumber pendapatan di hari tua, terlantar, biaya pengobatan jika cedera dan lain-lain.

"Saya mendengar kisah para atlet senior yang tidak tenang hidupnya di masa tua. Mereka atlet dan pekerja, butuh rasa aman, di masa jaya maupun tua. Butuh hidup layak agar bisa fokus berlatih dan berprestasi. Jika hidup serba kesulitan, jangan tuntut prestasi tinggi dari mereka," papar Gus Muhaimin saat acara 'Talkshow Olahraga dari Hobi ke Profesi' di Ballroom Menara BNI, Pejompongan, Jakarta, Selasa (30/11).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga mendesak Komisi X DPR RI untuk mengawal aspek regulasi, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Dia juga mendesak Kemnaker RI untuk memastikan aspek teknis ketenagakerjaan terhadap para atlet profesional nasional.

"Saya mendesak Kemnaker dan Komisi X DPR agar mengawal dari aspek regulasi (revisi UU SKN), dan Kemnaker dari aspek teknis ketenagakerjaan. Saya 5 tahun menjabat jadi Menaker, UU BPJS Ketenagakerjaan dilahirkan di periode saya, tahun 2011 silam. Saya paham betapa pentingnya jaminan sosial bagi mereka. Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Pensiun," kata politisi PKB tersebut. ■ eko/sf

# Komisi II Minta BPN Bergabung dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang. Foto: Novel/nvl

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bergabung ke pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini karena BPN dinilai sangat bersentuhan dan melekat dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dengan urusan atau persyaratan BPN.

“Ya kita akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) supaya sesegera mungkin mereka melibatkan diri dalam fungsi pelayanan publik ini, karena BPN sangat bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Junimart di sela-sela kunjungan

kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, Selasa (23/11).

Selain itu, lanjut Junimart, hadirnya BPN nantinya di Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa menghindari praktik penyimpangan urusan pertanahan yang kini sedang marak kasus mafia tanah di Indonesia. “Sebagaimana kita tau sekarang (banyak) mafia tanah yang beredar di Indonesia. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir penyimpangan tentang pertanahan sebaiknya BPN sesegera mungkin bergabung dengan MPP. Karena kalau BPN bergabung maka masyarakat juga semakin bisa terlayani,” tuturnya.

Di sisi lain, legislator dapil Sumut III ini juga mengapresiasi segala bentuk pelayanan terpadu dan aplikasi yang

diciptakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Salah satunya yaitu Aplikasi Vaksinasi Kota Tangerang (Avatar) yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh vaksin Covid-19. Aplikasi tersebut membuat proses pendaftaran vaksin maupun pendataan lebih praktis cukup menggunakan *smartphone*.

Menurut Junimart, apa yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam pelayanan publik yang sudah berbasis daring seperti aplikasi Avatar tersebut bisa menjadi inspirasi maupun contoh oleh kota dan kabupaten lain di Indonesia. “Saya tertarik dengan istilah Avatar tadi, bisa menjadi inspirasi supaya daerah lain atau kota lain minimal mengikuti pola yang dilakukan dari Kota Tangerang, bukan menyamai,” tutup Junimart. ■ nvl/es

# Komisi III Serap Masukan RUU Kejaksaan di Bali

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali. Ia mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, bahan, serta data yaitu berupa masukan terkait RUU Kejaksaan dari berbagai

pihak, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Provinsi Bali,” jelas Sahroni usai memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali, di Denpasar, Bali, Kamis (25/11).

Seperti diketahui, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kini dituntut untuk lebih berperan dalam



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Hanum/nvl

**S**istem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa adil dan persamaan di muka hukum. Oleh karena itu, dari berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang terjadi di DKI Jakarta yang didapat melalui berbagai sumber, Komisi III DPR RI menyambangi Polda Metro Jaya untuk mendapatkan data dan informasi untuk memaksimalkan hadirnya negara dalam membantu kesulitan masyarakat di masa pandemi.

“Persoalan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi strategis global dan stagnasi ekonomi nasional akibat Covid-19 juga berdampak pada seluruh bidang kehidupan. Hal ini menjadi perhatian penting karena berdampak juga pada meningkatnya kejahatan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J.

## Komisi III Soroti Penanganan Hukum Jakarta di Masa Pandemi

Mahesa saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran beserta jajarannya dan Kapolres se-Jakarta, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/11).

Menyoroti berbagai persoalan hukum yang terjadi, Desmond menilai perlu adanya sinergisitas antara aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta pelaksanaan PPKM level 1 hingga level 4 di seluruh wilayah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, karena ini menyangkut arah dan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Ini wujud dari komitmen Polri dalam mengawal program Pemulihan Ekonomi



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa. Foto: Azka/nvl

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Karena itu RUU Kejaksaan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melakukan penataan kembali terhadap institusi Kejaksaan. Nah kita lihat nanti bagaimana pembahasan RUU Kejaksaan yang masih dalam perjalanan ini. Semoga dapat menjadi kebaikan bersama dan punya independensi terkait dengan Kejaksaan itu sendiri,” tegas politisi daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III itu.

Dengan demikian, politisi Partai NasDem itu berharap semua pihak dapat saling mendukung dan menguatkan dalam menyikapi RUU Kejaksaan yang ditargetkan akan disahkan sebelum akhir tahun 2021 ini. Seperti langkah ke depannya untuk Kejaksaan yang lebih baik lagi, lebih independen, dan memiliki kapasitas yang semakin kuat. ■ hnm/sf

Nasional (PEN). Satgas PEN Bareskrim Polri punya misi untuk mendukung dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel,” jelas Desmond.

Selain melakukan sinergisitas dengan institusi hukum, politisi Partai Gerindra itu juga mengimbau agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan upaya deteksi pencegahan apabila ada penyimpangan.

“Bila ditemukan indikasi kesengajaan dalam perbuatan penyimpangan upaya penegakan hukum harus tetap dilakukan, karena alokasi anggaran negara sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional, jadi penyimpangan sekecil apapun harus dihindari dan dikawal institusi Polri,” pesan legislator daerah pemilihan Banten II tersebut. ■ azk/sf



Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana. Foto: Sofyan/nvl

## Eva Yuliana Dukung Peningkatan Kesejahteraan Jaksa

**A**nggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendukung penuh peningkatan kesejahteraan atau tunjangan para jaksa untuk dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan yang kini dibahas Komisi III DPR RI. Menurutnya, ketika kesejahteraan para jaksa itu terpenuhi, maka dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga nantinya tercipta proses hukum yang adil dan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

“Kesejahteraan rasanya dalam hal ini adalah tunjangan saya secara pribadi mendukung penuh diperhatikan mengenai tunjangan untuk para jaksa ini. Karena menurut hemat kami ketika tunjangan atau kesejahteraan itu terpenuhi dengan baik atau cukup, maka hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa diminimalisir,” kata Eva saat mengikuti pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beserta Kepala

Kejaksaan Negeri se-Jateng, dan Kapolda Jateng beserta jajaran PJU, di Semarang, Jateng, Kamis (25/11).

Eva menambahkan, jika terkait peningkatan kesejahteraan di RUU Kejaksaan tidak tertulis dalam pasal, dapat diperjelas melalui penjelasan maupun catatan terkait tunjangan yang dimaksud.

“Pada prinsipnya, tunjangan itu menjadi masalah yang menurut kami penting diperhatikan, karena ini berdampak pada bagaimana kualitas proses hukum atau kita berharap hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir,” jelas Eva.

Di sisi lain, politisi Partai NasDem itu mengapresiasi komunikasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam sistem yang tergabung atau *Integrated Criminal Justice System* di Jateng, yang sudah berjalan secara baik secara informal maupun formal.

*Integrated Criminal Justice System* itu dikaitkan Eva dengan persiapan RUU Penyadapan yang akan mulai dibahas Komisi III DPR RI dalam masa sidang ke depan. ■ sf

# Alih Fungsi Hutan di Batam Bisa Berdampak Buruk untuk Lingkungan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat memimpin Kunspek ke Batam. Foto: Andri/nvl

**B**anyaknya pembukaan lahan hutan lindung maupun hutan konservasi yang telah berubah fungsi di Kota Batam, Kepulauan Riau, dinilai akan mengganggu kelangsungan ekosistem dan mengurangi fungsi hutan lindung. Untuk itu, Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat melakukan langkah cepat untuk melakukan penanganan terkait pengalihan fungsi hutan lindung yang terjadi di Batam.

“Di mana yang kita lihat sekarang ini seharusnya menjadi resapan air, sekarang beralih fungsi menjadi permukiman. Lambatnya penanganan persoalan lingkungan akan berakibat fatal,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR

## Komisi IV Terima Keluhan dari Petani Bawang Merah Brebes

**T**im Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Anggia Erma Rini menerima keluhan dari kelompok tani bawang merah. Para petani menyampaikan bahwa harga bawang merah di tingkah

RI Budisatrio Djiwandono di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan untuk Permukiman dan Fasum/Fasos Komisi IV DPR RI, di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, (23/11).

Budi, sapaan akrabnya menegaskan, KLHK dan pemerintah daerah seharusnya bisa cepat melakukan tindakan pencegahan sebelum ada kerusakan yang lebih luas. Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan tinjauan ke dua titik lokasi, yakni Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong mengenai pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman atau fasum.

Kata Budi, pihaknya juga sempat berdiskusi bersama jajaran KLHK, apakah ada skema menggantikan hutan lindung yang sudah dilepaskan untuk dijadikan TORA itu. Apakah tidak ada upaya untuk menanam kembali atau mencari lahan pengganti hutan lindung yang sudah ditebang itu untuk dihijaukan kembali.

“Kami dari Komisi IV DPR RI sangat peduli dengan konservasi dan juga keberlangsungan serta keberlanjutan Sumber Daya Alam kita karena hutan itu adalah aset yang sangat penting untuk Indonesia,” tegasnya. ■ man/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini memimpin Kunspek ke Brebes. Foto: Ria/nvl



# Komisi IV Periksa Pembuangan Limbah PT RUM



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau Sungai Desa Gupit, di Sukoharjo. Foto: Eno/nvl

**K**omisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengecek saluran pembuangan limbah PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Sungai Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (23/11). Langkah ini guna merespons keluhan masyarakat sekitar perusahaan terhadap bau limbah di kawasan sungai yang menyengat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya tidak main-main menangani permasalahan limbah. Dia langsung memeriksa pipa saluran limbah yang dipasang di Sungai Gupit. Dedi menegaskan, Komisi IV DPR RI dan KLHK tidak main-main mengatasi pencemaran. "Itu eksekusi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semoga pemda, pemprov, dan kementerian bisa bekerja sama menyelesaikan masalah ini," ujar Dedi.

Usai meninjau sungai tempat pembuangan limbah, Komisi IV DPR RI ditemui perwakilan warga terdampak limbah PT RUM untuk menyampaikan keluhannya. "Pipanya bau dan sering bocor. Hampir setiap hari mencium bau busuk. Pipanya putus sudah empat bulan. Diperbaiki patah lagi," ujar Herman, warga terdampak limbah.

Tomo, perwakilan warga menambahkan, pemilihan Nguter sebagai lokasi PT RUM tidak tepat, karena sarana dan prasarana pendukung pengolahan rayon kurang memadai. "(Perusahaan) berdiri di dekat permukiman warga. Pemukimannya sudah ada terlebih dahulu sebelum pabrik. Kami usulkan alih produksi, karena industri rayon dampaknya luar biasa, sedangkan lokasinya tidak pas," beber Tomo. ■ eno/sf

petani, di Kabupaten Brebes kini merosot tajam.

"Harga bawang semula mencapai Rp15.000 kini turun menjadi Rp7.000 per kg. Kondisi itu menyebabkan para petani merugi, karena modal tanam dan hasil tidak sebanding," jelas Anggia usai di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (25/11).

Anggia menjelaskan, anjloknya harga bawang merah sering kali juga disebabkan karena panen raya dan daya serapan yang rendah. Di Brebes sendiri serapan bawang merah hanya 5 persen dari keseluruhan hasil panen. Demi mencegah harga jatuh atau anjlok ketika musim panen tiba, Anggia meminta pemerintah melakukan inovasi salah

satunya dengan meningkatkan ekspor bawang merah. Pasalnya, bawang merah hasil produksi Brebes sangat diminati di pasar luar negeri.

Terkait, kebutuhan *storage* (alat penyimpanan), pihaknya akan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk lebih memerhatikan keluhan ini. "Permasalahan ini memerlukan penanganan yang *extraordinary*. Setelah mendengar dan menggali informasi dari pemda dan poktan kita coba mencari solusi supaya permasalahan ini bisa terurai dengan baik sehingga dapat menyejahterakan dan menjawab masalah yang selama ini menjadi permasalahan para petani," kata politisi PKB itu. ■ rnm/es

# Manfaatkan Jejaring Diaspora untuk Ekspor, Komisi VI Apresiasi BNI Xpora



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kanan) saat meninjau produk UMKM binaan BNI Xpora. Foto: Sofyan/nvl

ini dimediasi BNI yang sebenarnya akses itu ada, tetapi (sebelumnya) tidak dimanfaatkan untuk jejaring pasar,” apresiasi Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau program BNI Xpora, di Kantor Xpora Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (23/11).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, selain melakukan pembinaan produk UMKM, BNI Xpora juga melakukan komunikasi dengan jejaring diaspora Indonesia di berbagai negara, sehingga dapat mengetahui produk yang diminati oleh pasar di negara-negara diaspora itu berada. Aria Bima mengaku sebelumnya tidak pernah terpikir diaspora menjadi salah satu media untuk menyampaikan berbagai keunggulan produk kepada *buyer-user* di berbagai negara dengan teknologi BNI Xpora. Menurutnya BNI di tengah destruksi teknologi saat ini, mampu melakukan *breakdown* program dengan cara yang teknokratik.

“Diaspora pasti ada *taste*. Diaspora tidak hanya melihat barang dari harga dan wujud fisiknya, diaspora akan lebih tahu *roso-nya* produk itu

**K**omisi VI DPR RI mengapresiasi dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program BNI Xpora. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, jika UMKM melakukan ekspor itu sudah biasa. Namun kehadiran BNI, yang awalnya hanya memberikan akses permodalan, kini meningkat ke pembinaan kualitas produk UMKM. BNI Xpora telah melakukan satu langkah menarik pasca-pandemi Covid-19, dengan melakukan pembinaan terhadap kualitas produk dari pelaku UMKM ekspor.

“Ini luar biasa. Ini saya yang terkaget-kaget, (BNI Xpora) memanfaatkan jejaring diaspora. Ini betul-betul meminimalkan *cost* untuk *promotion*, tapi juga membuka akses pasar dengan *size* ekonomi yang lebih luas. Karena diaspora kita luas, dan peran

## Standardisasi Produk dan Pemasaran jadi Kendala Pelaku UMKM Masuki Pasar Global

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyampaikan, sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Tercatat per Maret 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. Namun demikian, lanjut Martin, pasar dari produk UMKM nasional masih didominasi pasar lokal dan dalam negeri.

“Pelaku UMKM nasional masih memiliki beberapa kendala yang cukup besar dalam memasuki pasar global melalui kegiatan ekspor, antara lain permasalahan standardisasi produk, pemasaran, serta kendala pengiriman dan logistik,” ungkap Martin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Eselon I Kementerian BUMN dan Direksi PT BRI (Persero) Tbk dan jajarannya yang membahas dukungan BRI terhadap UMKM melalui Program BRILianpreneur, di Yogyakarta, Selasa (23/11).

seperti apa. Saya kira membedakan katalog atau media sosial dan dengan apa yang dibawa oleh kawan-kawan diaspora, mereka bisa menyampaikan *how to in the heart* dan *how in the mind* produk-produk Indonesia yang tentunya akan memberikan *kick back* kepada kita, produk apa yang disukai masyarakat di mana kawan-kawan diaspora itu berada. BNI Xpora telah melakukan terobosan untuk masuk di dalam *think global*, dengan memberikan *add local*, mendukung bagaimana daerah ini tidak hanya meng-Indonesia, tapi juga mengglocal,” puji legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebagai Pimpinan Komisi VI DPR RI, Aria Bima memastikan hasil kunjungan kerja spesifik yang luar biasa ini akan dibawa ke rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, sehingga berbagai BUMN lainnya juga dapat melakukan *pilot project* dukungan kepada UMKM. Bahkan menurutnya tidak hanya BUMN perbankan atau keuangan, tapi juga Pertamina atau Telkom, dapat menggunakan jejaring pasar ekspor. ■ sf

## Komisi VI Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan kepada PT Pertamina (Persero) agar segera menyelesaikan investigasi kebakaran di area kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu, dan menindaklanjutinya agar tidak terjadi lagi. Apalagi, kilang minyak Pertamina *Refinery Unit IV* Cilacap ini merupakan salah satu dari tujuh jajarannya unit pengolahan yang memiliki kapasitas produksi terbesar.

“Kita harapkan Pertamina memperbaiki kondisi ini supaya Pertamina yang kita banggakan ini tidak melulu (muncul) berita musibah dan kecelakaan,” tegas Hekal usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Dirut



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Arief/nvl

PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono beserta jajarannya, di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (23/11).

Hekal mengutarakan, saat ini Indonesia memasuki musim hujan, jika kilang terbakar karena petir rasanya tidak mungkin dan ini menjadi risiko juga buat masyarakat sekitar.

“Rasanya tidak mungkin kalau penyebab kebakaran karena petir, maka akan terjadi banyak kebakaran kilang, karena saat ini dan ke depan sudah masuk musim hujan dan kami terus menunggu evaluasi dan investigasi kebakaran kilang di Cilacap,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan ada beberapa isu penyebab kebakaran yang beredar, salah satunya dugaan sabotase agar *import crude* lebih besar lagi. Namun dugaan ini semua sudah dipatahkan, kalau sabotase itu masih dikaji oleh pihak kepolisian. “Dan alhamdulillah yang kebakaran kali ini tidak menyebar kemana-mana hanya satu tangki dan bisa dipadamkan kurang lebih satu malam,” pungkasnya. ■ afr/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Dep/nvl

la mengatakan, melihat permasalahan tersebut, BRI telah meluncurkan program *Brilianpreneur* UMKM Export yang bertujuan mendukung pelaku UMKM untuk memperluas jangkauannya ke pasar global. Target utama dari program *Brilianpreneur* tersebut agar pelaku UMKM dapat naik kelas dan *Go Global*.

“Terkait dengan hal itu, kami dari Komisi VI DPR RI ingin mendengar secara langsung terkait dukungan PT BRI (Persero) Tbk. terhadap UMKM melalui program *Brilianpreneur* meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, target dan tujuan yang diharapkan, mekanisme pemilihan pelaku UMKM yang terlibat, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan,” ucap legislator daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.

■ dep/es

# Komisi VII Himpun Data Produksi Gula Dalam Negeri



Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat memimpin kunspek Komisi VII ke Lampung. Foto: Anne/mvl

**W**akil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Lampung. Kunjungan ini untuk memastikan kapasitas produksi gula dalam negeri. Menurutnya, hal ini diperlukan guna mendapatkan gambaran utuh terkait perkembangan dan tantangan industri gula nasional.

“Kami di Komisi VII ada salah satu Panja (Panitia Kerja) khusus untuk pengawasan bahan baku impor industri. Kami salah satunya menyoroti maraknya impor bahan baku gula,” ujar Bambang di sela-sela pertemuan dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan jajaran direksi PT Sugar Group Companies selaku produsen gula terbesar Indonesia, di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/11).

Komisi VII DPR RI menilai perlu ada ketentuan batas minimal penggunaan bahan baku *raw sugar* produk dalam negeri untuk memproduksi gula kristal rafinasi dan gula kristal putih untuk konsumsi. Karena itu, Bambang menambahkan, saat ini Panja tengah menghimpun data produksi dari *stakeholder*, agar nantinya ditemukan angka yang tepat untuk rekomendasi dalam menentukan neraca komoditas gula tahun depan.

“Data kita sudah ada, namun data itu masih kita sinkronkan dengan pihak-pihak terkait tidak hanya kita mendengar data dari satu pihak. Sebab, ada dari Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan dan kita akan sinkronkan itu,” jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut.

Adapun, di Indonesia kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 5,8 juta ton per tahun, yang terdiri dari 2,7-2,9 juta ton per tahun gula konsumsi (gula kristal putih/GKP) dan 3-3,2 juta ton per tahun gula industri (GKR). Lebih lanjut Bambang berharap kebutuhan gula nasional dapat diimbangi dengan produksi dalam negeri yang meningkat dalam rangka mencapai swasembada gula seperti yang telah digaungkan.

“Kita ingin mengedepankan dan mendukung program Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan industri dalam negeri. Tujuan kami bahwa industri dalam negeri harus tumbuh pesat dan menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV tersebut. ■ ann/sf

# Komisi VII Dukung Penuh Pengembangan Industri Halal Indonesia

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Donny Maryadi Oekon menilai tidak ada kata terlambat bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Kendati negara lain sudah lebih dulu mengembangkan industri halal, ia yakin Indonesia bisa menjadi *leader* untuk industri halal.

“Singapura dan Thailand yang (jumlah) muslimnya tidak sebanyak Indonesia, sudah lebih dulu mengembangkan industri halal. Tapi tentu tidak ada kata terlambat untuk memulai dan mengembangkan industri halal di Indonesia. Dan saya yakin kita bisa *lead* dari negara-negara tetangga sekitar kita,” ungkap Donny saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendatangi

PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI), salah satu perusahaan yang menerapkan produk halal di Kawasan Modern Estate, Cikande, Serang, Banten, Kamis (25/11).

Oleh karena itu, lanjut Donny, pihaknya mendukung beberapa langkah yang diusulkan pemerintah, di antaranya penyediaan infrastruktur terpadu termasuk di dalamnya insentif fiskal bagi perusahaan produk halal, fasilitas dan pembentukan rantai nilai halal. “Insentif fiskal untuk produk halal salah satu jalan, karena memang ongkos distribusi kita tinggi. Kenapa fasilitas? Karena memang kita memang tidak ada kapal khusus untuk ekspor produk halal sehingga ongkos distribusi ekspor jadi tinggi,” jelasnya.

Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan tersebut mendukung penuh langkah yang disusun pemerintah untuk mengembangkan industri halal oleh Bangsa Indonesia. Meski beberapa usulan insentif fiskal dan upaya-upaya pemerintah lainnya itu tetap harus didiskusikan secara detail ke depan, termasuk bersama Komisi VII DPR RI. ■ *ayu/sf*



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan direksi PT CPI. Foto: Ayu/nvl

# Komisi VIII Usulkan Kota Bogor Jadi *Pilot Project* Revitalisasi KUA



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin kunker komisi VIII DPR RI di Bogor. Foto: Puntho/nvl

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan Kota Bogor sebagai *pilot project* revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), terlebih Kota Bogor sangat strategis yang letaknya berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta. Diah mengungkapkan penduduk Kota Bogor sudah sangat dikenal sebagai salah satu penduduk yang religius tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tapi juga secara nasional.

Diah menyampaikan hal ini usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat, Kakanwil Kemenag Kota Bogor, segenap Kepala KUA di Kota Bogor serta Direktorat

Jendral Bimas Islam Kemenag, di Kantor Kemenag Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (23/11).

“Komisi VIII DPR mendorong Kota Bogor dijadikan sebagai *pilot project* karena pertimbangan beberapa hal. Pertama, Kota Bogor terdiri dari enam kecamatan, di mana kecamatan terdapat 200 ribu penduduk, dekat dengan Jakarta dan penduduknya yang religius. Potensi-potensi inilah yang bisa jadi argumentasi kuat untuk kita usulkan ke Kemenag untuk Kota Bogor dijadikan *pilot project* terutama pembenahan dari *basic*,” ujar Diah.

Apalagi, revitalisasi KUA juga merupakan salah satu ruang bagi peningkatan moderasi umat beragama. Legislator dapil Jabar III ini menuturkan, dalam revitalisasi KUA, wajib adanya

perluasan pengembangan fungsi KUA yang tidak hanya sekadar untuk urusan pernikahan namun juga pelayanan untuk kehidupan umat beragama secara luas.

Terkait hal itu, sambung Diah, perlu adanya dukungan digitalisasi yang memang belakangan sering disosialisasikan oleh Menteri Agama. “Transformasi digitalisasi sangat dibutuhkan KUA. Seperti diketahui berbagai arsip pernikahan dari tahun 1950 yang ada di KUA sangatlah rentan. Seperti, jika suatu saat kantor tergusur atau banjir bisa diantisipasi karena surat nikah sangatlah penting berhubungan dengan hak waris. Hal-hal inilah yang menurut saya sangat *urgent* dibenahi Kemenag,” pungkas Diah. ■ pun/es

## Komisi VIII Tinjau Pembangunan Asrama Haji di Indramayu

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan, ke depan, Asrama Haji Embarkasi Indramayu akan menjadi tempat *screening* bagi calon jemaah umrah dan haji Indonesia asal Indramayu dan sekitarnya. Untuk itu, Komisi VIII menaruh perhatian khusus akan hal ini, mengingat ibadah umrah bagi Jemaah asal Indonesia dibuka pada akhir tahun 2021 ini sekaligus persiapan penyelenggaraan Haji pada tahun 2022 mendatang.

“Dimana, kedepan akan menjadikan Asrama Haji sebagai *One Gate System* sebagai pintu alur masuk, *screening* dan karantina calon jemaah umrah dan haji, dengan menerapkan standar protokol

# IAHN Gde Pudja NTB Perlu Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi

**A**nggota Komisi VIII Rachmat Hidayat mengatakan mendorong penguatan dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja. Menurut Rachmat, status perguruan tinggi yang berubah menjadi Institut sejak tahun 2020

tersebut, selama ini masih kurang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Jadi saya lihat ini kita buka-bukaan tadi, dia belum melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harus didorong untuk melaksanakan itu,” ujarnya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke IAHN Gde



Anggota Komisi VIII Rachmat Hidayat. Foto: Bianca/nvl

kehatan yang ketat,” papar Selly di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/11).

Komisi VIII juga berharap Asrama Haji Embarkasi Indramayu yang dibangun melalui dana SBSN 2020 dan SBSN 2021 dapat selesai pembangunannya pada akhir tahun ini dan dapat difungsikan pada tahun 2022

mendatang. Selain bermanfaat untuk peningkatan pelayanan kepada calon jemaah haji-umrah dan masyarakat, Asrama Haji ini juga menjadi penunjang strategis untuk percepatan pembangunan Indramayu ke depan.

Dalam kesempatan ini, Komisi VIII bersama dengan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memberikan beragam bantuan kepada masyarakat Indramayu yang berhak mendapatkannya. Di antaranya menyerahkan bantuan sebesar Rp3.374.846.890 untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim yang ditinggalkan orang tua karena terpapar Covid-19 sebanyak 82 anak dengan jumlah bantuan Rp26.500.000.

Selain itu, Komisi VIII dan Mensos juga memberikan alat bantu bagi 271 disabilitas dengan nominal bantuan mencapai Rp560.190.900, bantuan kebutuhan dasar bagi 337 orang dengan nominal Rp298.590.640. Bantuan kewirausahaan bagi 77 orang dengan total uang tunai Rp184.656.350, bantuan pengembang usaha bagi 2 KPM graduasi PKH sebanyak Rp5.000.000. ■ eko/es

Pudja di Kota Mataram, NTB, Selasa (23/11). Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker berdialog dengan para akademisi dan pemangku kepentingan di bidang perguruan tinggi keagamaan, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan bencana.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menilai, bahwa untuk dapat mewujudkan perguruan tinggi yang baik berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka IAHN Gde Pudja perlu memperkuat sisi internalnya. Mulai dari pengelolaan kampus, peningkatan mutu hingga pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya.

“Kampus itu harus kompak, untuk mengelola internalnya harus kompak, kalau tidak kompak bagaimana bisa masuk ke tujuannya, nggak mungkin kan? Maka saya tekankan harus kompak dulu, *teamwork*-nya. Jadi menempatkan orang pada posisi yang sebenarnya,” imbuhnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII juga menyalurkan bantuan Atensi Rehabilitas Sosial kepada anak yatim dan disabilitas. “Bantuan ini untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk pendidikan, tidak untuk dimakan saja, tapi untuk melanjutkan pendidikan mereka,” tutup Rachmat. ■ bia/es



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Foto: Eko/nvl

# Pandemi Covid-19, Komisi IX Harap Pemerintah Lindungi Pekerja Indonesia



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI berfoto bersama mitra kerja terkait di Kota Balikpapan. Foto: Saum/nvl

**M**emastikan tenaga kerja di Indonesia terlindungi dengan sebaik-baiknya, Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terkait perlindungan pekerja terutama pekerja sektor informal pada masa pandemi Covid-19. Terpuak akibat pandemi, Komisi IX DPR RI berharap segenap elemen pemerintah melindungi pekerja dengan bantuan dan jaminan yang sudah dicanangkan.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan hal tersebut usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (26/11), terkait perlindungan pekerja terutama pekerja informal di masa pandemi Covid-19. Ia menekankan, dengan jaminan dan bantuan tersebut,

tenaga kerja di Indonesia lebih aman untuk bertahan hidup dalam situasi dan kondisi krisis.

“Kami berharap pekerja informasi dilindungi oleh jaminan sosial, jaminan jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan jika terdapat kematian, serta bantuan seperti kartu prakerja. Kami berharap mereka (pekerja) didorong untuk menjadi peserta BP Jamsostek serta BPJS Ketenagakerjaan, ini yang kita harapkan. Supaya masyarakat menjadi terbantuan dalam kondisi seperti ini.” tutur Felly.

Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) DPR RI itu mengapresiasi ketahanan provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi krisis. Terbukti Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam jajaran tiga besar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 34 provinsi di Indonesia.

Tentu saja, pencapaian tersebut, Felly menegaskan, tidak lepas dari peran sektor pendidikan yang baik. “Pendidikan di sini cukup bagus. Kaltim masuk sebagai peringkat ke 3 dari IPM provinsi di Indonesia, setelah DKI dan Jogja loh. Biasanya kalau pendidikan bagus, maka kesehatannya juga bagus, dan lainnya pun mengikuti.” terang legislator dapil Sulawesi Utara itu.

Dengan pencapaian yang sudah diperoleh, ia tidak ingin Kaltim terlena. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim harus memaksimalkan segala potensi yang dimiliki supaya segera bangkit dan pulih dari pandemi Covid memang menghantam berbagai sektor sejak dua tahun terakhir ini.

“Ke depan akan ada pemulihan, saya meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan masyarakat terutama para pekerja yang mengalami kesulitan,” tandas Felly. ■ ts/sf

**K**omisi IX DPR RI menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang perlindungan pekerja informal pada masa pandemi Covid-19 di Maluku Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 66,13 persen masyarakat Maluku Utara bekerja di sektor informal dan sisanya 33,87 persen bekerja di sektor formal dari angkatan kerja sebesar 552.680 orang di tahun 2020.

“Di samping itu, dilaporkan bahwa 66,13 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal dan sisanya, yaitu 33,87 persen bekerja pada kegiatan formal yang status bekerja sebagai Buruh, Karyawan, Pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap,” ucap Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (25/11).



## Harus Ada Forum Tripartit yang Objektif Bahas Upah Minimum

**A**nggota Komisi IX DPR RI Sungkono meminta harus ada forum tripartit yang objektif dalam pembahasan upah minimum, baik skala provinsi, kota, hingga kabupaten. Forum tripartit yang dimaksud diantaranya pemerintah, pelaku usaha/investor, dan buruh/pekerja. Sebab, ia tidak ingin sektor usaha terus diperas untuk membayar para pekerja, tapi kesejahteraan para pekerja juga diharapkan tidak terpukul terutama di saat pandemi seperti ini.

“Kami juga tidak ingin sektor usaha terus diperas. Karena kalau sektor usaha terus di-*plokoto* (dibodohi) ya juga tidak mau kita. Jadi jalan tengahnya harus ada tripartit yang objektif,” ujar Sungkono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi IX DPR RI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (25/11).

Anggota Fraksi PAN DPR RI ini menjelaskan situasi pandemi ini tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi bagi pekerja informal, tetapi juga pekerja formal. Di sektor informal, seharusnya kesejahteraan pekerja informal meningkat di saat jumlah barang ekspor di Kota Batam justru naik di saat pandemi. Karena itu, Sungkono meminta agar para pengusaha tidak selalu berlindung di balik ketentuan upah minimum.

“Karena mereka (pengusaha) dalilnya adalah yang penting tidak melanggar ketentuan. Mudah-mudahan ini dipahami semua pihak. Karena antara pemerintah, buruh, dan para investor



Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono. Foto: Ridwan/nvl

itu satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Saya khawatir nanti terjadi gejolak sosial yang merembet kemana-mana kalau terjadi demonstrasi buruh,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur I ini. ■ rdn/sf

## Komisi IX Himpun Informasi Kebijakan Perlindungan Pekerja di Masa Pandemi



Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Eot/nvl

Dalam kesempatan ini, Komisi IX DPR RI juga melakukan analisa tentang kebijakan yang ditempuh dan diimplementasikan dalam rangka perlindungan pekerja informal pada masa pandemi, melakukan pengawasan, dan menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan pekerja informal pada masa pandemi Covid-19 ini.

Politisi PDI-Perjuangan menyampaikan pentingnya penyiapan tenaga kerja terampil dan kompeten dengan mendukung upaya Pemerintah Pusat dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara, untuk pengembangan dan perluasan Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate di Sofifi dengan luas tanah 5 hektar. “Perluasan BLK tersebut menjadi bagian penting mengingat kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara,” tandasnya. ■ opi/sf

# Komisi X Harap Destinasi Wisata Labuan Bajo Miliki Nilai Kebermanfaatan Bagi Masyarakat



Tim Kunspek Komisi X DPR RI saat meninjau Taman Nasional Komodo di NTT. Foto: Ica/nvl

**K**ementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang fokus dalam pengembangan lima Destinasi Super Prioritas, salah satunya Labuan Bajo. Oleh karena itu Komisi X DPR RI mengingatkan pengembangan destinasi wisata di Labuan Bajo hendaknya perlu diperhatikan dengan lebih serius, terutama agar destinasi wisata memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar.

Hal tersebut dipaparkan oleh Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR di Labuan Bajo,

Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (22/11). “Dan satu hal yang perlu menjadi perhatian di (Labuan Bajo) sini adalah manfaat dari pariwisata untuk masyarakat yang ada di sekitarnya,” jelas Andreas.

Andreas memaparkan semua fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, khususnya dalam program Destinasi Super Prioritas, harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar. Andreas menilai Kemenparekraf perlu, berfokus pada pengembangan Destinasi Super Prioritas agar dapat lebih memberdayakan masyarakat sekitar, mengingat hal tersebut dapat menjadi

salah satu strategi pemulihan wisata pasca pandemi.

“Masyarakat di Labuan Bajo ini menyambut dengan positif, bahwa pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo ini luar biasa pesatnya. Dalam waktu yang relatif singkat, Labuan Bajo berubah menjadi suatu kota pariwisata dan Labuan Bajo menjadi salah satu Destinasi Super Prioritas yang megah,” papar politisi PDI-Perjuangan itu.

Andreas menegaskan, salah satu upaya agar masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata ini mendapatkan nilai kebermanfaatan dari dibukanya tempat-tempat wisata di sekitar mereka, yaitu

dengan cara memberikan pelatihan, fasilitas, dan dukungan dari berbagai pihak untuk kepentingan pariwisata, terutama untuk masyarakat.

Selain itu, Andreas juga menambahkan perlunya peningkatan promosi pariwisata di Labuan Bajo kepada masyarakat luas. “Selama ini memang sudah dilakukan promosi, khususnya oleh Badan Otorita Labuan Bajo, Flores. Tapi saya kira perlu lebih gencar lagi promosinya Labuan Bajo, terutama bukan hanya hal-hal umum, tapi sampai kepada detailnya, misalnya di Pulau Padar ada 875 anak tangga yang harus dilalui sebelum sampai di spot Puncak,” papar Andreas. ■ Ica/sf

# Komisi X Harap Anggaran Kemenparekraf Fokus Kembangkan Wisata di Belitung

“Jika alokasi anggaran penetapan program prioritas, pengembangan desa-desa wisata dan destinasi wisata, yang akan tumbuh bukan hanya destinasi wisata yang diprioritaskan tetapi juga seluruh destinasi wisata yang diberikan Tuhan seperti Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi ini yang ada di Belitung,” tutur legislator dapil Jawa Timur X itu.

Diketahui pariwisata Belitung memiliki 3 nomenklatur, yakni Belitung sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, serta Belitung sebagai Unesco Global Geopark. ■ pdt/sf

**A**nggota Komisi X DPR RI Zainudin Maliki meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk terus mengoptimalkan potensi wisata di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Zainudin, optimalisasi dapat dilakukan salah satunya dengan memfokuskan alokasi anggaran.

“Kami berharap untuk Kemenparekraf fokus (pada) anggaran untuk betul-betul mengembangkan potensi yang luar biasa

yang diberikan Tuhan kepada Bangsa ini khususnya di Belitung,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Belitung, Babel, Senin (22/11).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan alokasi anggaran ini dapat dilakukan dengan menetapkan program prioritas yang unggul, sehingga dapat mengangkat potensi wisata yang ada. Hal ini tentunya akan kembali menggairahkan dunia pariwisata di Belitung yang sempat terguncang karena pandemi.

”

**KAMI BERHARAP UNTUK KEMENPAREKRAF FOKUS (PADA) ANGGARAN UNTUK BETUL-BETUL MENGEMBANGKAN POTENSI YANG LUAR BIASA YANG DIBERIKAN TUHAN KEPADA BANGSA INI**



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau potensi pariwisata Pantai Tanjung Tinggi di Kabupaten Belitung. Foto: Prima/nvl

# Komisi XI Setujui Dua Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

**K**etua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Komisi XI DPR RI telah menyetujui dan menyepakati dua kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2021-2026, yang akan menggantikan dua Deputi Gubernur Bank Indonesia saat ini yang telah memasuki masa akhir jabatan.

“Komisi XI DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI juga telah mendalami secara keseluruhan materi dari kedua calon tersebut, dan menilai kedua calon Deputi Gubernur tersebut memiliki kompetensi dan kualifikasi melaksanakan tugas ke depan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia,” kata Dito usai memimpin Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XI DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) secara fisik dan virtual dengan hasil memutuskan menerima dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Jуда Agung dan Aida S Budiman, secara musyawarah dan mufakat. Dito meyakini, di dalam kepemimpinan kedua Deputi Gubernur BI tersebut, Bank Indonesia mampu untuk dapat memenuhi tantangan dengan kebijakan yang dapat merespon tantangan tersebut, juga dapat terus berkontribusi bagi

perekonomian Indonesia.

“Perekonomian Indonesia ke depan masih penuh tantangan dan diperlukan



**KOMISI XI DPR RI MELAKSANAKAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) SECARA FISIK DAN VIRTUAL DENGAN HASIL MEMUTUSKAN MENERIMA DUA CALON DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA**

berbagai kebijakan untuk merespon tantangan tersebut. Kedua calon tersebut memiliki rekam jejak di Bank Indonesia yang sangat baik, dan saya berharap dengan terpilihnya Bapak Jуда Agung dan Ibu Aida S Budiman sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dapat berkontribusi untuk memperkuat Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan mandat Undang-Undang bank Indonesia,” harap politisi Partai Golkar itu.

Diketahui, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan calon Deputi Gubernur BI, dan melalui Rapat Internal ditetapkan dua nama Calon Deputi Gubernur BI yang baru, untuk kemudian nantinya akan disahkan di dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. ■ ndy,pun/sf



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Ojji/nvl



# DPR Minta Dunia Jangan Lupakan Palestina



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat mengikuti sidang ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) di Madrid. Foto: Ist/nvl

**S**ituasi kemanusiaan warga Palestina di wilayah pendudukan dinilai semakin memburuk. Laporan dari PBB maupun berbagai laporan badan-badan independen menyatakan bahwa Palestina terkena dampak krisis yang berkepanjangan. Meningkatnya ketegangan di Yerusalem Timur, eskalasi ketegangan di Jalur Gaza sejak Mei 2021, dan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung semakin memperparah situasi.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan masing-masing negara diharapkan tidak melupakan Palestina. "Kami khawatir karena kesibukan masing-masing negara menghadapi berbagai tantangan mendesak

seperti perubahan iklim, kemunduran demokrasi, kemiskinan dan sebagainya, kemudian isu Palestina ini menjadi terpinggirkan," kata Fadli Zon dari Madrid, Spanyol, Minggu (28/11).

Pada Sidang ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara tatap muka dengan yang dihadiri 179 parlemen nasional dan 13 parlemen regional, BKSAP mengajukan *emergency item* mengenai situasi kemanusiaan di Palestina. *Emergency item* yang diusung Indonesia adalah mengenai krisis kemanusiaan di Palestina. "Dunia berutang pada rakyat Palestina atas kemerdekaan yang direnggut dari mereka. Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak lagi dukungan politis bagi upaya kemerdekaan

Palestina," tambah Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pandemi global Covid-19 juga sangat mempengaruhi kondisi Negara Palestina. Secara kumulatif, terdeteksi lebih dari 150 ribu orang tertular virus Covid-19. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan. Pembatasan akses ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, serta layanan perlindungan sosial lainnya makin memperburuk situasi.

Oleh sebab itu, rakyat Palestina membutuhkan dukungan terus menerus dari dunia internasional. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP terus mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdaulat dan layak. Selain itu, BKSAP juga menggalang solidaritas global melalui partisipasi di forum-forum antar parlemen.

Menanggapi hal tersebut, kelompok geopolitik regional ASEAN+3, Asia Pasifik, Parlemen negara OKI dan Parlemen Asia telah menyampaikan dukungannya. Akan tetapi pada detik-detik terakhir sebelum *voting*, masuk usulan baru dari kelompok parlemen negara Afrika mengenai akses dan ketersediaan vaksin Covid-19.

Setelah melalui *lobby* dan negosiasi serta mencermati perkembangan terkini, Indonesia memutuskan untuk menarik usulan *emergency item*. Aspek urgensi di tengah maraknya varian baru Covid-19 yakni Omicron yang dinilai bisa lima kali lebih menular dari varian aslinya menjadi salah satu pertimbangan utama.

Tentunya hal ini tidak berarti Indonesia mengenyampingkan isu Palestina. Negara-negara anggota IPU, perlu menjaga komitmen penuh kepada rakyat Palestina untuk memenuhi hak-hak dasar menentukan nasib sendiri, dan penciptaan Palestina yang merdeka. Solusi dua negara tetap menjadi opsi terbaik dalam upaya ikut serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan regional. Isu Palestina sendiri akan diajukan kembali tahun depan pada Sidang ke-144 IPU di Bali, tahun depan. ■ **bia/sf**

# BURT Apresiasi Program Jamkestama di RS Hermina Manado



Foto bersama Pimpinan dan Anggota BURT DPR RI bersama para stakeholder di Manado, Sulawesi Utara. Foto: Ayu/mvl

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati

Natakusumah mengapresiasi RS Hermina sebagai rumah sakit *provider* yang menjalankan program jaminan kesehatan utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI bersama keluarganya.

“Kami mengapresiasi rumah sakit Hermina sebagai rumah sakit *provider* Jasindo yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi anggota DPR RI yang notabene merupakan peserta Jamkestama,” ujar Dimiyati dalam pertemuan Tim Kunker BURT dengan Jasindo, perwakilan RS Hermina Manado, di Sulawesi Utara, Senin (29/11).

Hal tersebut, bisa dilihat dari pelayanan yang diberikan RS Hermina

Manado. Salah satunya melalui pendampingan yang dilakukan oleh pihak RS terhadap Anggota DPR RI atau keluarganya yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan fasilitas-fasilitasnya, RS ini dirasa sangat cukup dan layak melayani peserta Jamkestama.

Meski demikian politisi PKS ini berharap agar ada penambahan infrastruktur di RS Hermina (terutama yang terkait dengan Jamkestama). Seperti penambahan kamar-Kamar perawatan, termasuk kamar VIP dan VVIP dan fasilitas lainnya.

Pasalnya sebagaimana dijelaskan rumah sakit tersebut pada awalnya merupakan rumah sakit ibu dan anak, yang kemudian berkembang menjadi rumah sakit umum yang ikut menangani

berbagai pasien lainnya. Sehingga memang butuh penataan kembali berbagai infrastruktur dan fasilitas di dalamnya. ■ ayu/es

”

**KAMI MENGAPRESIASI RUMAH SAKIT HERMINA SEBAGAI RUMAH SAKIT PROVIDER JASINDO YANG TELAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK BAGI ANGGOTA DPR RI YANG NOTABENE MERUPAKAN PESERTA JAMKESTAMA**



# BURT Dorong Manajemen Bandara Pattimura Kontrak Kerja Sama dengan Layanan Lounge



Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti saat memimpin kunjungan BURT ke Bandara Pattimura. Foto: Jaka/nvl

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Evita Nursanti mendorong agar manajemen Bandara Internasional Pattimura Ambon segera melakukan kontrak kerja sama dengan layanan lounge di bandara. Palsanya, semenjak pandemi Covid-19 belum ada kerja sama antara manajemen bandara dengan pihak lounge. Menurutnya, hal ini tentu merugikan penumpang *business class* yang tidak bisa mendapatkan layanan tersebut.

“(Layanan lounge) itu kan hak sebagai penumpang ketika membeli tiket *business class* atau menggunakan kartu platinum. Kalau memang disebabkan karena kondisi pandemi, harusnya mereka tetap buka, tapi terbatas. Namanya hak, biar satu rupiah pun harus diterima. Oleh karena itu, kami mendorong agar segera dilakukan kerja sama, baik itu dari pihak maskapai Garuda, Joumpa maupun Angkasa Pura I dengan pihak lounge,” jelas Evita saat memimpin pertemuan Tim Kunker

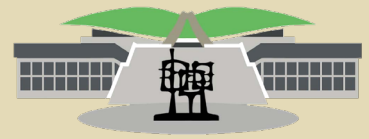
BURT DPR dengan jajaran direksi PT Gapura Angkasa dan PT Angkasa Pura I di Bandara Internasional Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (27/11).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, kondisi ini tentu tidak *fair*, karena setiap tiket *business class* itu sebenarnya memang ada fasilitas untuk layanan lounge tersebut, tapi di Bandara Pattimura belum ada. Padahal di bandara ini sudah ada sejumlah lounge seperti Concordia maupun lounge dari pihak swasta lainnya. Selain itu, legislator dapil Jawa Tengah III tersebut mengungkapkan, pihaknya merasa senang saat ini mobilitas penumpang pesawat di Maluku semakin meningkat mencapai 50 persen.

“Alhamdulillah, saya tadi menanyakan (peningkatan mobilitas penumpang), hal itu disebabkan karena ada mobilitas pergerakan penumpang yang memang rutin dilakukan banyak orang di sini dan itu bukan penduduk asli (Maluku). Kemudian, memang karena sedang ada program dan proyek yang sedang *on going*, sehingga di sini banyak penerbangan maupun hotel yang tetap terisi walaupun di saat pandemi,” imbuh Evita.

Dalam kesempatan yang sama, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon, Pribadi Maulana menjelaskan, bentuk kerja sama layanan lounge dilaksanakan melalui maskapai penerbangan atau perbankan. Semenjak pandemi ini, memang belum dibuka dan kerja sama kontrak layanan lounge untuk penumpang *business class*.

“Sebelumnya sudah ada kerja sama kontrak pihak maskapai Garuda dengan lounge di sini. Cuma karena pandemi (layanan lounge) untuk sementara dihentikan. Ke depan yang memungkinkan bekerjasama maskapai Garuda dengan lounge Concordia. Sambil menunggu kontrak itu, sebagai kompensasi penumpang yang tidak mendapatkan layanan lounge, sejumlah maskapai memberikan *cashback* berupa uang,” tutup Pribadi. ■ jk/sf



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menggelar silaturahmi kebangsaan ke kantor Konferensi Waligereja Indonesia di Cikini, Jakarta, Senin (29/11). Foto: Jaka/nvl



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat menjadi Dewan Juri Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) X dan menerima masukan dari peserta terkait RUU KSDAE, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, (29/11) . Foto: Oji/nvl



Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha melepas lima pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang memasuki masa pensiun di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/11). Foto: Runi/nvl

